

**FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MEWUJUDKAN STABILITAS
KETERSEDIAAN PANGAN DI PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI



Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Oleh :

ROBBY MARDINO J

NIM. H1A114160

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JAMBI

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

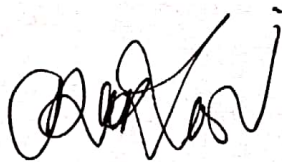
FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MEWUJUDKAN STABILITAS KETERSEDIAAN PANGAN DI PROVINSI JAMBI

Nama : Robby Mardino J
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A114160

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2
untuk diujikan dalam Sidang Skripsi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 29 April 2021

Dosen Pembimbing 1



Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum.
NIP. 196404111994031001

Dosen Pembimbing 2



Iswandi, S.H., M.H.
NIP. 197906212005011003

LEMBAR PENGESAHAN

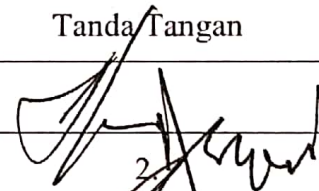
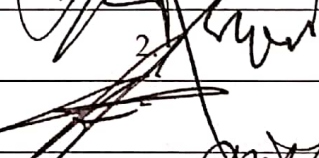
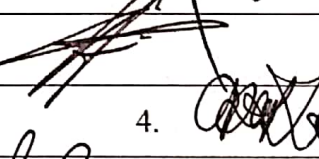
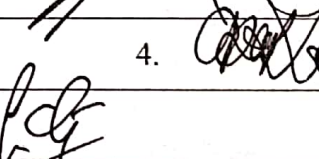
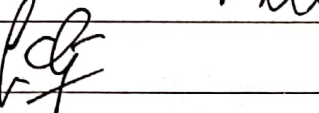
FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MEWUJUDKAN STABILITAS KETERSEDIAAN PANGAN DI PROVINSI JAMBI

Nama : Robby Mardino J
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A114160

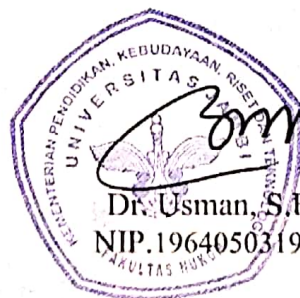
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 7 Juni 2021

Dewan Penguji Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dhil's Noviades, S.H., M.H.	Ketua Penguji	1. 
2	Dr. Afif Syarif, S.H., M.H.	Penguji Utama	2. 
3	Citra Darminto, S.IP., M.M	Sekretaris	3. 
4	Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum.	Anggota	4. 
5	Iswandi, S.H., M.H.	Anggota	5. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP.196405031990031004

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini pada:

Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Sarjo Hadi dan Ibu Maryati

Kedua Saudaraku tercinta kakak dan adik Doni dan Andini

Almamater tercinta

MOTTO

“Jangan samakan proses hidupmu dengan proses hidup orang lain. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing”

SURAT PERNYATAAN

Nama : Robby Mardino J
NIM : H1A114160
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Mewujudkan Stabilitas Ketersediaan Pangan Di Provinsi Jambi.
Alamat : Jl. Dr. Sumbiono No. 07 RT 16, Kec/Kel Jelutung Kota Jambi
No. HP : 082299001161

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 29 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Robby Mardino J
H1A114161

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the function by the Food Security Office of Jambi Province in realizing food availability, especially rice in Jambi Province. This research is motivated by the need for food whose availability must be fulfilled by the community. The main problems faced at this time are the growth in demand for food which is faster than its supply needs. Demand increases in line with population growth, economic growth, people's purchasing power and changes in lifestyle. Fulfilling food needs for the community is a fundamental problem that requires special attention from the government. In realizing the availability of rice, the Jambi Provincial Food Security Office coordinates with various related agencies since food problems are not only a matter for the Food Security Office, but also involve various cross-sectors. In addition, the Food Security Office of Jambi Province also provides guidance to reactivate the existing barns so that when the harvest is abundant at low prices as well as there is food scarcity it can be stored, and supervision of commodity prices in the field to stabilize prices at affordable levels. Method of the research approach used in this study was a qualitative approach which is an approach used to examine the natural conditions of the object (as opposed to an experiment) and the researcher is the key instrument. The analysis technique used in this research was an interactive analysis model which data presentation and drawing conclusions were carried out continuously with the data collection process in the form of interviews as a cycle process.

Keywords: Function, Resilience, Food, and Stability.

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mewujudkan ketersediaan pangan khususnya beras di Provinsi Jambi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pangan yang ketersediaannya harus terpenuhi bagi masyarakat. Berbagai permasalahan utama yang dihadapi pada saat ini adalah pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta perubahan gaya hidup. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat merupakan masalah mendasar yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dalam mewujudkan ketersediaan beras, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi saling berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait karena masalah pangan bukan hanya urusan bagi Dinas Ketahanan Pangan saja, melainkan melibatkan berbagai lintas sektor. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi juga melakukan pembinaan untuk pengaktifan kembali lumbung yang ada agar saat panen melimpah dengan harga yang murah dapat disimpan dan ketika terjadi kerawanan pangan dan juga pengawasan terhadap harga komoditi dilapangan untuk menstabilkan harga pada level terjangkau. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif dimana penyajian data dan penarikan kesimpulan yang aktivitasnya dilakukan secara terus menerus dengan proses pengumpulan data berupa wawancara sebagai proses siklus.

Kata kunci: Fungsi, Ketahanan, Pangan, dan Stabilitas.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Mewujudkan Stabilitas Ketersediaan Pangan Di Provinsi Jambi”**. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian tugas akhir program studi Strata 1 Ilmu Pemerintahan. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengumpulkan dan mengkaji dari berbagai referensi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses kegiatan penulisan, mulai dari penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan bantuan, serta do’a dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. A.Zarkasi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Iswandi, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan memberikan arahan serta semangat dengan ikhlas dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, penulis juga dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Jambi Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D selaku pemimpin di Universitas Jambi yang telah memfasilitasi pembuatan skripsi bagi seluruh mahasiswa Universitas Jambi.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi bapak Dr. Usman, S.H., M.H yang telah memfasilitasi pembuatan skripsi ini bagi mahasiswa angkatan kedua di Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi.
3. Wakil Dekan bagian Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi, Wakil Dekan bagian Umum, Perencana, dan Keuangan, dan Wakil bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah mendukung, memfasilitasi dan membantu mahasiswa selama proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Syamsir, S.H., M.H selaku Ketua jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Hukum Politik Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menulis skripsi.
5. Bapak Makmun Wahid, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dan menyetujui segala prosedur dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah merekomendasikan dalam pengontrakan mata kuliah.
7. Ibu Dhill's Noviades, S.H., M.H. Ketua Penguji Sidang Skripsi yang telah memimpin kelancaran sidang skripsi.
8. Bapak Dr. Afif Syarif, S.H., M.H. Penguji Utama Sidang Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis agar dapat menulis skripsi lebih baik lagi.

9. Bapak Citra Darminto, S.IP., M.M. Sekretaris Penguji Sidang Skripsi yang telah membantu kelancaran sidang.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
11. Bapak/Ibu Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam pelayanan administrasi.
12. Kedua Orang Tua tercinta yang selalu mendo'akan dengan tulus, menyangi dan yang selalu mendengarkan segala keluhan selama perkuliahan.
13. Kedua saudaraku kakak dan adik tercinta Doni Restu Utama dan Andini Destri Aulia yang selalu mendukung dan memberi semangat dan perhatian dalam menyelesaikan studi.
14. Keluarga Besar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.
15. Sahabat-sahabatku anggota Grup Kain Lap: Imam Ansory, Indra Kurniawan, Dany Prasetyo, Ranti Amelia, Puspita Vicky Ayu Shila Devi, Ernipa Juliani, dan Bella Dwi Fitriai yang telah memberikan perhatian, memberi bantuan, nasihat dan dukungan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat secara akademik dan praktis. Akhir kata penulis mengucapkan terima

kasih yang setulus-tulusnya. Semoga bantuannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Jambi, 29 April 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Robby Mardino J', written over a horizontal line.

Robby Mardino J

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
ABSTRACT	vi
INTI SARI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Landasan Teori	11
1.5.1 Pemerintah Daerah	11
1.5.2 Kebijakan Publik	13
1.5.3 Konsep Ketahanan Pangan	14
1.6 Kerangka Berpikir	20
1.7 Metode Penelitian.....	21
 BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
2.1 Deskripsi Wilayah Provinsi Jambi.....	29
2.2 Deskripsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	35
2.2.1 Sejarah Singkat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	35
2.2.2. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	38

**BAB III FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MEWUJU-
DKAN STABILITAS KETERSEDIAAN PANGAN DIIPRO-
VINSI JAMBI**

3.1 Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mewujudkan Stabilitas Ketersediaan Beras Di Provinsi Jambi	43
3.2 Faktor-faktor yang menjadi hambatan Dinas Ketahanan Pangan dalam menjaga stabilitas ketersediaan beras di Provinsi Jambi ...	55

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Kerangka Berpikir	20
2. Tabel Produksi Padi dan Beras Provinsi Jambi	35
3. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran, salah satunya adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional.¹

Ketahanan Pangan Nasional adalah salah satu isu paling strategis dalam pembangunan terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar.² Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.

Guna memperlancar urusan penyediaan pangan tersebut pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenang pemerintahannya kepada Pemerintah Daerah atau dengan menerapkan azas desentralisasi bisa dikatakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan segala urusan baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun

¹ Siti Dzarroh, *Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Boyolali*, Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang, 2015, hlm 1.

² Rachmat Muchjidin, *Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan Dan Perannya Dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan*. Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 29 No. 1, Juli 2011, hlm 1.

penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada daerah yang kemudian menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.³ Adapun yang dimaksud menurut adalah kewenangan untuk mengurus sendiri sesuatu urusan sehingga dibentuklah berbagai dinas sesuai dengan urusan urusan yang akan diselenggarakan. Oleh karena itu dinas pada setiap masing-masing daerah akan berbeda dengan daerah lain. Sedangkan Daerah Otonom, menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 12 menegaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya tujuan otonomi daerah adalah tercapainya pemerintahan yang baik, adil, dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan dalam membuat peraturan sendiri berdasarkan peraturan perundang-

³ Inu Kencana Syafii, *Sisitem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2011), hlm.57.

undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai potensi yang dimiliki daerah.

Dalam pemerintahan pelaksanaan otonomi daerah dalam sebuah kebijakan dilakukan untuk melihat kerangka dalam menata kelembagaan pemerintahan daerah dan kelembagaan pemerintahan di daerah, dengan merubah dan menempatkan organisasi menjadi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan daerah yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Organisasi pemerintahan merupakan suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas, yang berfungsi secara relatif teratur dalam rangka mencapai suatu atau serangkaian tujuan. Koordinasi yang baik sangat membantu pencapaian efektivitas organisasi yang bersangkutan.

Seperti diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan Pemerintah Daerah juga mengatur tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yakni pada Pasal 11 dan Pasal 12 dimana terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Dalam hal Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, pemerintah daerah mempunyai urusan yang tidak berkaitan pelayanan dasar yang meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan

menengah. Hal ini Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengurus daerahnya masing-masing begitu pun halnya dengan masalah pangan.

Ketahanan pangan di suatu daerah merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pemerintah memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan, yakni menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup. Peran pemerintah tersebut dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk dapat lebih memaksimalkan lagi perannya dalam menjaga ketahanan pangan serta ketersediaannya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pangan merupakan istilah yang amat penting bagi pertanian karena secara hakiki pangan merupakan salah satu kebutuhan paling dasar dalam pemenuhan aspirasi humanistik. Masalah konsumsi pangan dan pemenuhannya akan tetap merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.⁴ Status konsumsi pangan penduduk sering dipakai sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat.

⁴ Rita Hanafi, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: C.V Andi OFFSET, 2010), hlm 272.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling asasi, Kecukupan, aksesibilitas dan kualitas pangan yang dapat dikonsumsi seluruh masyarakat, merupakan ukuran-ukuran penting untuk melihat seberapa besar daya tahan bangsa terhadap setiap ancaman yang dihadapi.⁵

Berbagai permasalahan utama yang dihadapi pada saat ini adalah pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta perubahan gaya hidup. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat merupakan masalah mendasar yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, mengingat sampai sekarang pemerintah Indonesia masih mengimpor beras sebagai pangan pokok.

Ketahanan pangan secara luas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kecukupan pangan masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, kecukupan pangan mencakup segi kuantitas dan kualitas, baik dengan memproduksi sendiri maupun membeli dipasar. Di bidang pangan, Indonesia masih menghadapi masalah tingginya ketergantungan pangan masyarakat pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.⁶

Terwujudnya sistem ketahanan pangan akan tercermin antara lain dari ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta terwujudnya diversifikasi pangan baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Oleh Karena itu, pembangunan di bidang pangan

⁵ Didit Herdiawan, 2011. *Ketahanan Pangan & Radikalisme*, (Jakarta: Republika), hlm 3.

⁶ Rita Hanafi *Op. Cit*, hlm. 271.

diarahkan pada peningkatan swasembada pangan, tidak hanya berorientasi pada beras.⁷

Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.⁸ Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Dari sisi produksi peningkatan ketahanan pangan tersebut diupayakan melalui peningkatan produksi beras terutama yang dihasilkan dari lahan sawah. Pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut adalah bahwa beras merupakan bahan pangan pokok penduduk yang memiliki sumbangan paling besar terhadap konsumsi kalori dan protein. Klasifikasi pangan yang begitu banyak maka dari itu dalam tulisan ini hanya terfokus pada jenis Pangan Beras.

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia. Kecukupan ketersediaan beras pada tingkat nasional maupun regional menjadi prasyarat bagi terwujudnya ketahanan pangan nasional. ketahanan pangan sangat tergantung dari ketersediaan stok beras yang bisa disediakan secara nasional. Beras dapat digolongkan menjadi komoditas subsistem karena produk

⁷ Suhardi, dkk, 2002, *Hutan Dan Kebun Sebagai Sumber Pangan Nasional*, (Yogyakarta: Kansius), hlm 21.

⁸ Yunastiti Purwaningsih, Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9. No. 1. Juni 2008, hlm 1.

yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga produsen atau petani dan selebihnya untuk dijual ke pasar.

Beras mempunyai peran yang sangat strategis dalam pemantapan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan stabilitas politik nasional, dalam hal ini perlu ditingkatkan pembangunannya, strategi pembangunan tanaman pangan beras yang ditempuh selama ini adalah pembangunan irigasi teknis, pemberantasan hama dan penyakit pasca panen. Luas panen padi yang terbatas dan produktivitas padi yang belum maksimal, tentu saja berimplikasi pada terbatasnya hasil panen yang diperoleh. Hasil produksi padi yang sedikit atau tidak maksimal maka akan mengakibatkan keuntungan petani tidak dapat maksimal dan ketersediaan beras menurun.

Kebutuhan masyarakat akan pangan pokok beras tidak bisa ditahan dan sampai saat ini dan masih tetap merupakan salah satu masalah yang harus diatasi oleh sektor pertanian. Bertambahnya jumlah penduduk maka akan secara otomatis akan terjadi peningkatan kebutuhan akan pangan. Manusia sesuai dengan kodratnya butuh makan untuk mempertahankan dan melanjutkan hidupnya. Pertumbuhan masyarakat jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pangan.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ir. Amir Hasbi, konsumsi beras masyarakat Provinsi Jambi 92.1 Kg perkapita pertahun jika dikalikan penduduk 3,6 juta lebih berarti kebutuhan 397.080 ton, kalau diasumsi

300 gram maka 1103 ton perhari atau 33.090 ton sebulan.⁹ Beliau juga mengungkapkan, meskipun sampai saat ini kekuatan yang dimiliki Provinsi Jambi dalam upaya peningkatan produksi pangan khususnya beras cukup besar, namun ketersediaan pangan khususnya beras di Provinsi Jambi masih bergantung di beberapa wilayah seperti Palembang, Lampung dan Padang.

Ketersediaan beras sampai saat ini tetap menjadi masalah utama untuk masa mendatang, untuk itu harus dicari cara dan upaya baru yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Perlunya ketersediaan stok beras yang cukup untuk tidak menutup kemungkinan jika Provinsi harus bergantung dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Semakin berkurangnya lahan pertanian dapat memungkinkan terjadinya rawan pangan pada kondisi dan kondisi tertentu yang disebabkan oleh faktor alam ataupun lainnya. Kerawanan pangan yang sering kali dikaitkan dengan kemiskinan menjadi isu nasional. Salah satu faktor penyebab adalah melambungannya harga beras yang pada gilirannya saat menyulitkan keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin (gakin) sehingga keluarga semacam ini oleh pemerintah dipandang perlu untuk mendapatkan jaminan beras (Raskin).¹⁰

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selaku salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

⁹ Pemerintah Provinsi Jambi Lakukan Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal Non Beras, 19 (Agustus 2020), <https://halojambi.id/index.php/advertorial/53-pemprov/5616-pemerintah-provinsi-jambi-lakukan-gerakan-diversifikasi-pangan-lokal-non-beras>. Diakses pada 24 November 2020. Pukul 20.23.

¹⁰ Bambang Hendro Sunarminto, 2014, *Pertanian terpadu Untuk Mendukung kedaulatan Pangan Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm 14.

kebijakan mengharuskan dinas terkait untuk mengatasi masalah tersebut guna terwujudnya ketahanan pangan yang mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian (beras) potensi lokal menuju kemandirian daerah karena mewujudkan ketersediaan merupakan tugas dinas tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, guna melihat bagaimana pelaksanaan fungsi yang di lakukakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan stabilitas ketahanan pangan di Provinsi Jambi, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Mewujudkan Stabilitas Ketersediaan Pangan Di Provinsi Jambi”**

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan stabilitas ketersediaan beras di Provinsi Jambi?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan Dinas Ketahanan Pangan dalam menjaga stabilitas ketersediaan beras di Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mewujudkan stabilitas ketersediaan beras daerah di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan Dinas Ketahanan Pangan dalam menjaga stabilitas ketersediaan beras di Provinsi Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu bahan pemikiran dalam menentukan kebijakan pemerintah dalam bidang ketahanan pangan. Dengan kata lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada pemerintah dalam mewujudkan stabilitas ketersediaan pangan.

2. Manfaat Akademis

Merupakan satu persyaratan untuk mencapai Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk dijadikan sebagai pengetahuan yang dapat menambah informasi dalam bidang ketahanan pangan.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Pemerintah Daerah

Pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan suatu (eksekusi) atau melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.¹¹

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agar tujuan dari pembentukan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya maka suatu kekuasaan tidak hanya berada di satu orang atau organisasi saja, tetapi juga di distribusi dan di bagi ke posisi yang lebih rendah hierarkinya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang

¹¹ Inu Kencana Syafii, "*Ilmu Pemerintahan* " (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 9.

Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental.

Kebijakan merupakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan dan merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹²

Suatu kebijakan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan para aktor kebijakan melalui proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis dalam proses kebijakan publik tersebut menurut William N. Dunn melalui 5 tahap yang meliputi :

1. Tahap Perumusan Masalah

Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

¹² Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service, 2014), hlm 20.

2. Tahap Forecasting (Peramalan)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

3. Tahap Rekomendasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

4. Tahap Monitoring Kebijakan

Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

1.5.3. Konsep Ketahanan Pangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 Tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menurut Karsin, Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan.¹³ Janin dalam kandungan, bayi, balita, anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut membutuhkan makanan yang sesuai dengan syarat gizi untuk mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mencapai prestasi kerja.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 4 Tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan merupakan cerminan ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan merata yang mampu diakses setiap individu sehingga penyerapannya dapat dilakukan secara maksimal demi pencapaian hidup yang sehat dan produktif. Tirtosudiro dalam Bulog mendefinisikan ketahanan

¹³ Teguh Supriyanto. *Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Desa Mandiri Pangan Di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2014, hlm. 9.

pangan nasional sebagai kemampuan negara untuk menghasilkan jumlah bahan pangan yang memadai bagi konsumen dengan harga yang terjangkau.¹⁴

FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tidak berisiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut.¹⁵ Ini berarti konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan memadai, stabilitas, dan akses terhadap pangan-pangan utama.

Paradigma ketahanan pangan berkelanjutan menegaskan bahwa ketersediaan pangan yang cukup adalah penting, tetapi tidak memadai untuk menjamin ketahanan pangan. Sesungguhnya, tidak akan ada ketahanan pangan bila tidak ada ketersediaan pangan yang cukup untuk diakses. Meskipun tersedia pangan yang cukup, sebagian orang dapat menderita kelaparan karena mereka tidak mempunyai akses terhadap pangan (*hunger paradox*).¹⁶

Cadangan pangan di Indonesia wajib meliputi: (1) cadangan tetap (*iron stock*), artinya pemerintah wajib memiliki cadangan beras untuk keperluan logistik nasional, apapun kondisinya; dan (2) cadangan penyanggah (*buffer stock*), artinya pemerintah akan menyanggah atau menjaga situasi yang tidak diinginkan. Stok penyanggah berbeda menurut daerah, lokasi geografis,

¹⁴ Tedy Dirhamsyah dkk, *Ketahanan Pangan: Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat daerah Rawan Pangan di Jawa*. (Yogyakarta: Plantaxia, 2016), hlm. 15.

¹⁵ Rita Hanafie. *Op. Cit*, hlm. 272.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 274.

kerentanan terhadap fenomena alam dan karakter transportasi pada lokalitas tertentu.¹⁷

Ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat subsistem, yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, (iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (iv) status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual pengertian ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari

¹⁷ Bustanul Arifin, 2007, *Diagnosis ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 17.

masih sering ditekankan pada aspek makro yaitu ketersediaan pangan.¹⁸

ketahanan pangan terdiri dari empat subsistem atau aspek utama yaitu:

1. Ketersediaan pangan (*food availability*) yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan.
2. Akses pangan (*food access*) yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan.
3. Penyerapan pangan (*food utilization*) yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita.
4. Stabilitas pangan (*food stability*) merupakan dimensi waktu dari ketahanan pangan yang terbagi dalam kerawanan pangan kronis (*chronic food*

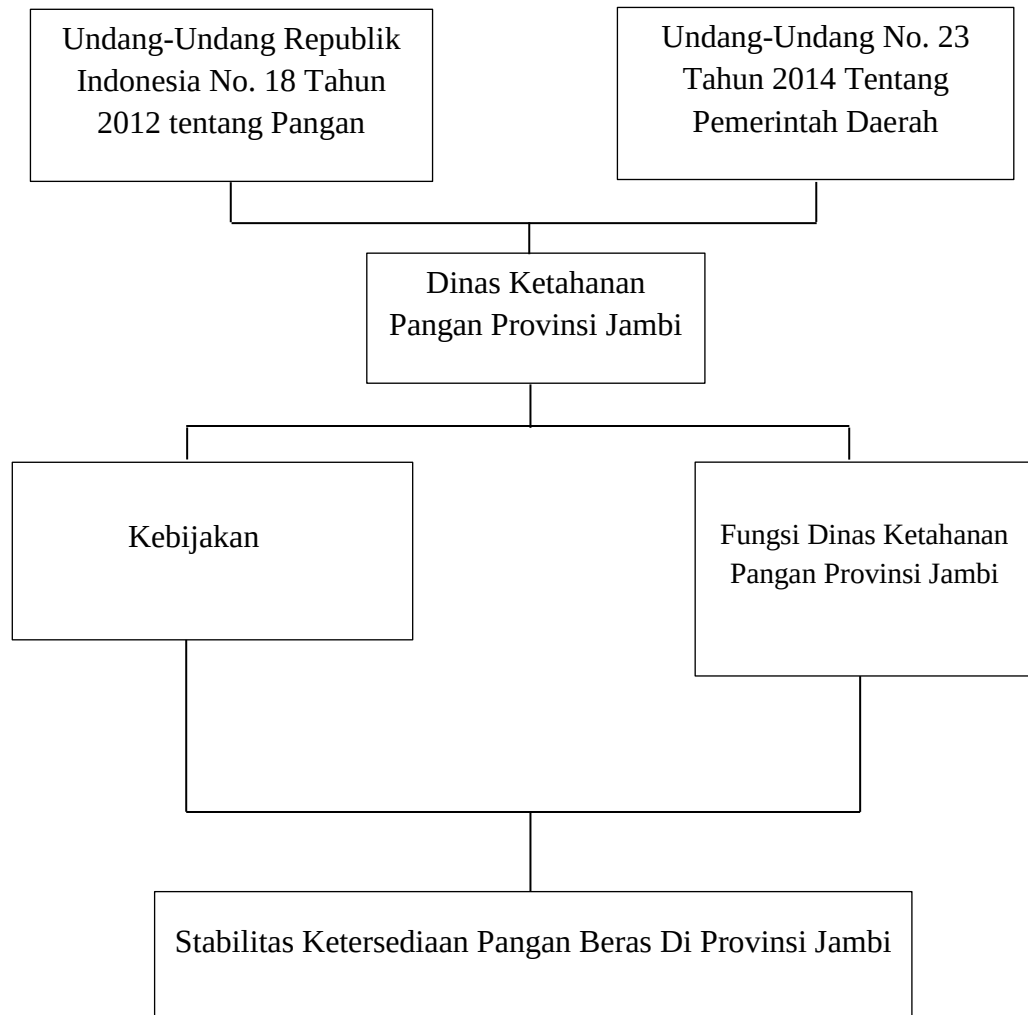
¹⁸ Heri Suharyanto. Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 4 No.2. November 2011. hlm 178.

insecurity) dan kerawanan pangan sementara (*transitory food insecurity*).

Kerawanan kronis adalah ketidak mampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawana pangan sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi secara sementara yang diakibatkan karena masalah kekeringan, banjir, bencana, maupun konflik sosial.¹⁹

¹⁹ Catur Indra Gunawan, *Op. Cit*, hlm 21-24.

1.6 Kerangka Berpikir



Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Maka dari itu pemerintah melalui Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan, pemerintah membentuk

lembaga yang secara khusus mengurus pangan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah daerah.

Pangan merupakan komoditi strategis yang berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Sejalan dengan hal tersebut untuk mengurus pangan di daerah melalui Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2016 dibentuklah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk mengurus pangan di Provinsi Jambi. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi diharapkan dalam menjalankan fungsinya dapat menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Provinsi Jambi khususnya beras, mengingat ketahanan pangan suatu wilayah dipengaruhi oleh ketersediaan, distribusi dan harga serta konsumsi pangan.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

generalisasi.²⁰ Penelitian kualitatif tidak menggunakan kuisisioner dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka, maka dari itu pada penelitian ini tidak menggunakan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data. Sedangkan untuk instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti (*human instrument*).

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Data yang didapat oleh penlitit menggunakan jenis deskriptif kualitatif yaitu berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode studi kasus, yaitu fenomena khusus yang dihadirkan dalam suatu konteks yang terbatas (bounded text), meski batas-batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas.²¹ Peneliti ingin mengungkapkan secara mendalam mengenai pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam upaya mewujudkan stabilitas ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Salah satu lembaga pemerintahan yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 1.

²¹ *Ibid*, hlm 12.

2. Lokasi / Objek Penelitian

Lokasi/objek penelitian ini tepatnya di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang mana dinas tersebut yang berwenang dalam bidang ini.

3. Fokus Dan Dimensi Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian mengingat klasifikasi pangan yang cukup banyak maka pangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah beras yang difokuskan pada pelaksanaan dari fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam upaya mewujudkan stabilitas ketersediaan beras Jambi.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer, dan data sekunder.²² Berikut penjelasan mengenai sumber data yang digunakan diantaranya :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan yang terkait langsung dengan bidang ketahanan pangan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain.²³ Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh

²²*Ibid*, hlm 225.

²³*Ibid*.

baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis meambaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian dengan membaca referensi buku dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan persoalan.

5. Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memberikan informasi lengkap mengenai hal yang diketahui peneliti. Caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang siap dan dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Maka dapat ditentukan sebagai berikut.

Informan:

1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
2. Kepala Bidang Ketersedian Pangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
3. Kepala Seksi Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan

peneliti adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi menurut Nasution adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall menyatakan, melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*) observasi yang secara terang-terangan dan tersamarkan (*over observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur.²⁴

Berdasarkan teori di atas, maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan Observasi Partisipatif. Namun observasi pasrtisipatif yang dilakukan bersifat pasif, yang mana peneliti datang ke tempat kegiatan orang atau badan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Esterberg mendefinisikan interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Ia mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 226.

²⁵ *Ibid*, hlm. 231.

Berdasarkan teori di atas, peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁶ Wawancara ini tidak berstruktur atau terbuka, sehingga peneliti lebih mudah mendapatkan informasi yang lebih dalam dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁷ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi ini dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh data penelitian, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang diambil dari berbagai dokumen, seperti: peraturan perundang-undangan, laporan, arsip yang berkait dengan penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini untuk menganalisis datanya digunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman

²⁶ *Ibid*, hlm. 233.

²⁷ *Ibid*, hlm. 82.

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut model ini tiga komponen analisa yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang aktivitasnya dilakukan secara interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Selanjutnya data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder tersebut dilakukan secara terus menerus yaitu sejak awal pengumpulan data hingga pengumpulan data berakhir. Proses analisis data tersebut dilakukan melalui tiga tahapan:²⁸

- a. Analisis pada tahap pertama dilakukan sejak awal pengumpulan data dengan maksud untuk mencari dan menentukan fokus serta untuk mempertajam pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara selanjutnya;
- b. Analisis pada tahap kedua dilakukan setelah data yang telah banyak terkumpul. Peneliti kemudian memilah-milah dan mengelompokkan data yang telah ada berdasarkan tema atau kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Analisis pada tahap ketiga dilakukan setelah semua data dianggap cukup. Peneliti mulai melihat hubungan-hubungan antara tema atau fenomena secara menyeluruh dan sistematis, kemudian peneliti

²⁸ *Ibid*, hlm. 246.

melakukan suatu kontekstualisasi antara tujuan dan target penelitian dengan berbagai macam temuan nyata atau riil yang ada di lapangan.

e. Triangulasi Data

Dalam keabsahan data ini juga dilakukan proses triangulasi. Menurut sugiyono ada tiga macam triangulasi data yaitu triangulasi sumber, triangulasi data dan triangulasi waktu. Penjelasan dari ketiga triangulasi akan dipaparkan sebagai berikut:²⁹

1. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas dengan tata cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.
3. Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering dipengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pagi, siang maupun malam hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

²⁹ *Ibid*, hlm. 273-274.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Deskripsi Wilayah Provinsi Jambi

2.1.1. Gambaran Umum Provinsi Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km² yang terdiri atas :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,67%)
2. Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,25%)
3. Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,25%)
4. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,28%)

5. Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,53%)
6. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,58%)
7. Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 Km² (9,24%)
8. Kabupaten Tanjab Timur 5.445 Km² (10,82%)
9. Kabupaten Tebo 6.641 Km² (13,19%)
10. Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%)

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupatem Merangin sebesar 7.679 Km² atau sebesar 25,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 Km² dan 6.184 Km².

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di provinsi Jambi tahun 2016 sebanyak 141 kecamatan dan 1.562 desa/kelurahan, dimana jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yaitu 24 kecamatan, sedangkan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci yaitu 285 desa/kelurahan.

2.1.2. Demografis Provinsi Jambi

Jumlah penduduk Provinsi jambi tahun 2016 sebanyak 3.458.926 jiwa, pada tahun 2015 sebanyak 3.402.052. Selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 1,67 persen. Kepadatan penduduk tahun 2016 menurut Kabupaten/Kota:

1. Kabupaten Kerinci 70 orang/km²

2. Kabupaten Merangin 48 orang/km²
3. Kabupaten Sarolangun 45 orang/km²
4. Kabupaten Muaro Jambi 77 orang/km²
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 39 orang/km²
6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 68 orang/km²
7. Kabupaten Tebo 52 orang/km²
8. Kabupaten Bungo 75 orang/km²
9. Kota Jambi 2.840 orang/km²
10. Kota Sungai Penuh 224 orang/km²

2.1.3. Pendidikan

Salah satu program pokok pembangunan Provinsi Jambi adalah meningkatkan pembangunan sektor pendidikan formal, mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai perguruan tinggi dan pendidikan non formal, berupa pendidikan dan latihan berbagai bidang pengetahuan keterampilan yang diperlukan untuk membangun serta pembinaan generasi muda, serta dalam bidang olah raga dalam mempersiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani. Jumlah sekolah negeri dan swasta di provinsi Jambi:

1. Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 1.246 buah.
2. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2.370 buah.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 575 buah.
4. Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 219 buah.

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 170 buah.

Jumlah murid :

1. TK sebanyak 40.264 siswa.
2. SD sebanyak 390.782 siswa.
3. SMP sebanyak 126.689 siswa.
4. SMA sebanyak 73.734 siswa.
5. SMK sebanyak 45.826 siswa.

Jumlah guru:

1. TK sebanyak 3.641 orang.
2. SD sebanyak 27.993 orang.
3. SMP sebanyak 11.702 orang.
4. SMA sebanyak 5.501 orang.
5. SMK sebanyak 3.906 orang.

2.1.4. Kesehatan

Penyediaan berbagai sarana kesehatan di Provinsi Jambi pada tahun 2016 jumlah rumah sakit 35 buah, puskesmas 189 buah dan pustu 613 buah. Disamping penyediaan sarana kesehatan yang berguna untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan sampai ke pelosok desa, juga diperlukan penyediaan tenaga medis/kesehatan lainnya. Di Provinsi Jambi pada tahun 2016 terdapat 1.085 tenaga medis, dan 10.778 orang tenaga bidan/perawat yang tersebar di setiap kabupaten/kota

Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang tercatat pada tahun 2016 sebanyak 66.663, sedangkan jumlah persalinan yang ditolong oleh dukun bayi adalah sebanyak 2.819.

2.1.5. Agama

Tentang keagamaan meliputi data jumlah penduduk menurut agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan lainnya) serta tempat ibadah (masjid, musholla, gereja, vihara, pura). Disamping itu juga menyajikan data jamaah haji dan tanah wakaf.

2.1.6. Perumahan dan Lingkungan

Luas kawasan hutan di Provinsi Jambi seluas 1.167.638 hektar, terdiri dari kawasan hutan produksi seluas 973.920 hektar, kawasan hutan lindung seluas 182.302 hektar, dan hutan di konversi seluas 11.416 hektar.

2.1.7. Pertanian

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu Negara tidak perlu dipertanyakan lagi. Bukan hanya karena pada masa krisis hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan yang positif, tapi tidak ada satu Negara majupun di dunia dimana pertaniannya tidak maju. Pertanian menjadi landasan perekonomian suatu Negara, menjadi sumber pangan, sandang dan papan yang bermutu, murah, dan berkesinambungan bagi masyarakat suatu bangsa, sebagai sumber bahan baku bagi industri lainnya, dan sebagai pemasok tenaga kerja bagi sektor manufaktur dan sektor jasa di perkotaan.

Pertanian merupakan sektor ekonomi potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan kontribusi devisa (Kuznet, 1964). Pertama, kontribusi produk, diartikan bahwa produk-produk pertanian sangat menentukan pengembangan sektor ekonomi lainnya melalui penyediaan makanan (konsumsi) dan penyediaan bahan baku (keterkaitan produksi) bagi kegiatan industri. Dalam konteks ekonomi makro, sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, kontribusi pasar, yaitu besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan intensitas pembangunan pertanian merupakan sumber pertumbuhan yang penting bagi pasar domestik untuk produk-produk dari industri, termasuk pasar untuk barang produsen (input produksi pertanian) maupun barang konsumsi. Besar kecilnya kontribusi pasar tergantung dari sistem ekonomi dan jenis teknologi yang dipakai dalam pertanian. Ketiga, kontribusi faktor-faktor produksi, sektor pertanian dianggap sebagai sumber modal investasi melalui proses transfer surplus modal dari pertanian ke sektor non pertanian, proses transfer tenaga kerja dari pertanian ke sektor non pertanian, dalam proses pertumbuhan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja pertanian (pedesaan) ke sektor industri dan jasa (perkotaan) karena terjadi perbedaan tingkat produktivitas diantara dua sektor tersebut. Keempat, kontribusi devisa yaitu sektor pertanian mampu berperan

sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau ekspansi produksi komoditas-komoditas pertanian yang menggantikan impor (substitusi impor).

Tabel 1

Tabel Produksi Padi dan Beras Provinsi Jambi

Wilayah	Produksi Padi dan Beras	
	Produksi Padi (ton)	Padi Beras (ton)
	2018	2018
Provinsi Jambi	500 021	287 756
Kerinci	104 521	60 150
Merangin	41 984	24 160
Sarolangun	20 256	11 658
Batanghari	50 074	28 817
Muaro Jambi	39 065	22 483
Tanjung Jabung Timur	73 018	42 020
Tanjung Jabung Barat	65 396	37 635
Tebo	35 447	20 400
Bungo	27 038	15 559
Kota Jambi	6 522	3 754
Kota Sungai Penuh	36 700	21 120

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2019³⁰

2.2. Deskripsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

2.2.1. Sejarah Singkat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Periode 2001 – 2008

³⁰ <https://jambi.bps.go.id/pressrelease/2018/11/01/307/luas-panen-dan-produksi-padi--di-provinsi-jambi>, Diakses pada 24 Juli 2020. Pukul 20.30.

Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi awal mulanya sebelum dilaksanakannya Undang-undang Otonomi Daerah merupakan peleburan dari 2 (dua) unit kerja yakni Sekretariat Pengendali Bimas (Setdal Bimas) Departemen Pertanian dan Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Pertanian yang terbentuk pada Tahun 2001 dibawah naungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Landasan Hukum:

1. UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kepegawaian Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 2, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 pasal 16 tentang susunan organisasi dan tugas Departemen Pertanian.

8. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian
10. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Periode 2009 - 2010

Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Periode 2011 -2016

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Landasan Hukum :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Periode 2017 - Sekarang

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Landasan Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

2.2.2. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

2.2.2.1. Visi

Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat menuju Jambi tuntas 2021.

2.2.2.2. Misi

Sesuai dengan fungsi dan visi yang ingin diwujudkan, maka misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan yang berbasis sumberdaya lokal.
- b. Memantapkan penanganan kerawanan pangan.
- c. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk pangan pokok.
- d. Mewujudkan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat menjadi beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
- e. Meningkatkan tata kelola ketahanan pangan yang bersih transparan akuntabel dan partisipatif dalam pelayanan publik.

2.2.2.3. Tujuan

Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan.

2.2.2.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2016-2021 berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan, meliputi:

1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
2. Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan 1% per tahun.
3. Ketersediaan Energi Minimal 2.400 kkal/kap/hari dan Protein sebesar 63 gr/kap/hari.

4. Stabilitasnya Harga Pangan Pokok dan Strategis di tingkat Produsen dan Konsumen.
5. Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk mengantisipasi Kerawanan Pangan.
6. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

2.2.2.5. Strategi

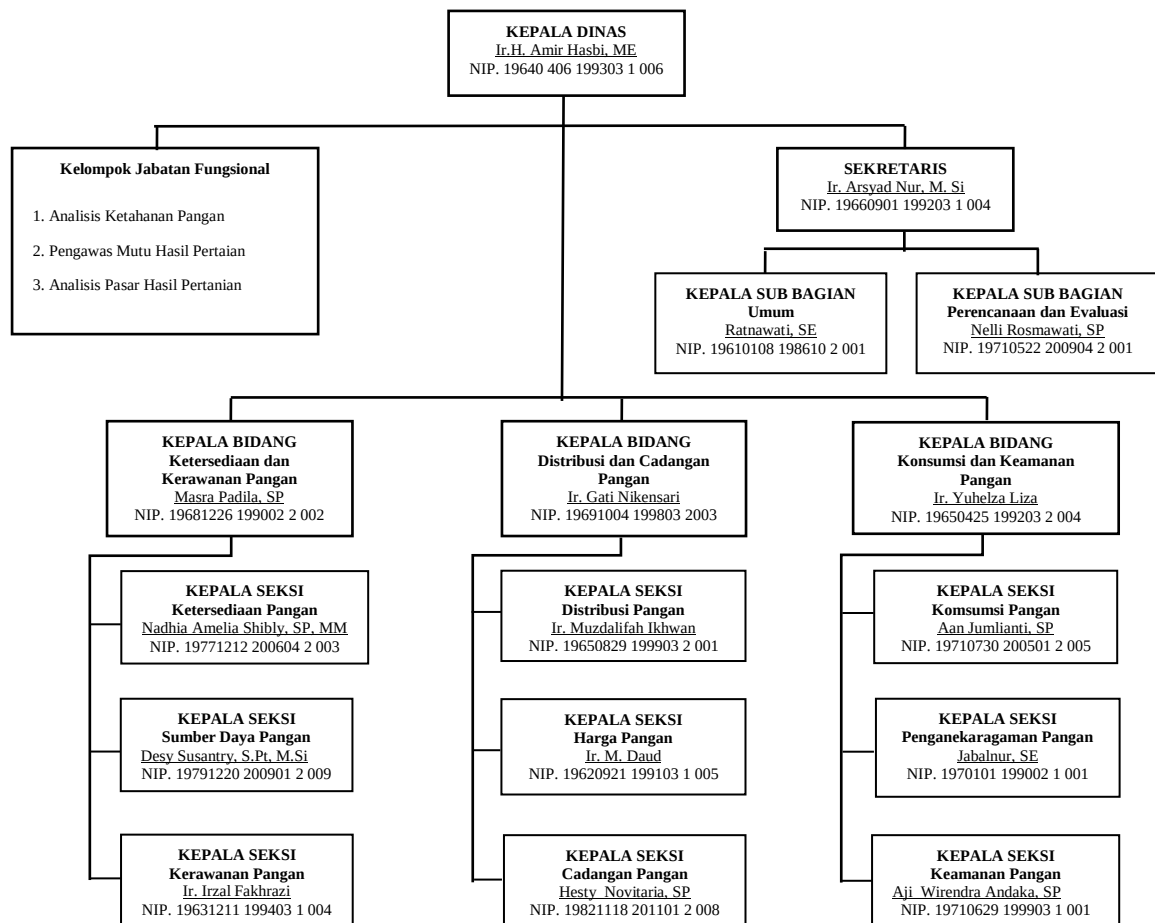
1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar.
3. Mendorong peran serta swasta, masyarakat sipil dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar.
4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat.
5. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan Dana Masyarakat.
6. Memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

2.2.2.6. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi daerah menuju swasembada pangan.
2. Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif.
3. Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.
4. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.
5. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan.
6. Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.
7. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal.
8. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial.
9. Mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan

2.2.2.7. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi



BAB III

FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MEWUJUDKAN STABILITAS KETERSEDIAAN PANGAN DI PROVINSI JAMBI

Dalam bab ini, akan dianalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang sudah disajikan dalam bab terdahulu. Adapun analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil informasi data tersebut sesuai dengan fokus kegiatan ini.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan para informan, maupun catatan-catatan penulis sewaktu melakukan penelitian selama dilapangan, maka dapat diberikan suatu analisa tentang pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan provinsi Jambi mewujudkan stabilitas ketersediaan pangan beras dalam sistem pemerintahan daerah di provinsi Jambi.

3.1. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mewujudkan Stabilitas Ketersediaan Beras Di Provinsi Jambi

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Maka segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam bidang ketahanan pangan menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Dalam penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah, permasalahan Pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, artinya pangan merupakan suatu urusan yang menjadi salah satu urusan pemerintahan yang bersifat vital dan berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang banyak terutama di Provinsi Jambi.

Ketahanan pangan suatu wilayah dipengaruhi oleh ketersediaan, distribusi dan harga serta konsumsi pangan. Ketersediaan pangan berasal dari produksi pangan, import, ekspor setelah dikurangi kegunaan lain (bibit, pakan ternak, industri non pangan, dan sebagainya) dan setelah dilakukan konversi serta tercecer susut baik ketika masih dilahan maupun di gudang penyimpanan.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Klasifikasi pangan yang begitu banyak maka dari itu dalam tulisan ini hanya terfokus pada jenis Pangan Beras.

Berdasarkan hal tersebut maka peranan pemerintah sangat dibutuhkan mengingat beras juga merupakan makanan pokok masyarakat, terutama masyarakat Jambi. Oleh karena itu peranan Pemerintah Provinsi Jambi dalam

menjalankan fungsi pemerintahannya terkait dengan hal ini dapat dilihat melalui sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam hal ini ketahanan pangan perlu dimaknai sebagai kondisi terpenuhi pangan bagi negara sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya untuk hidup aktif, produktif dan berkelanjutan. Ketahanan pangan, lanjutnya merupakan sistem yang kompleks melibatkan peran lintas sektor dengan penanganan secara multi disiplin. Ketahanan pangan perlu diwujudkan melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektor/berbagai lembaga/institusi dan masyarakat. Maka dari itu adanya rapat koordinasi sebagai komunikasi lintas sektor yang membahas isu-isu terkini terkait ketahanan pangan di tingkat Provinsi Jambi sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun program ataupun upaya tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya.

“Menurut Ibu Nadhia Amelia Shibly, Permasalahan pangan ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan saja, karena pangan ini cakupannya luas, kita saling berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam forum komunikasi lintas sektor membahas isu-isu terkini terkait ketahanan pangan, dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai dengan isu yang dibahas. Rumusan sebagai bahan masukan bagi pengambilan kebijakan,

penyusunan program, ataupun upaya tindak lanjut yang akan dilakukan.”³¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan bersama instansi terkait lainnya saling berkoordinasi dalam mewujudkan ketersediaan pangan khususnya beras yang masing-masing memiliki perannya masing-masing. Rakor merupakan forum koordinasi yang sangat strategis untuk memecahkan masalah, merumuskan kebijakan serta menyatukan komitmen untuk pemantapan ketahanan pangan. Pertemuan koordinasi dan evaluasi berupaya untuk menghasilkan rumusan dan langkah-langkah tepat dalam penanganan permasalahan ketahanan pangan guna membangun ketahanan pangan untuk kebutuhan jangka menengah maupun jangka panjang.

2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan kebijakan umum ketahanan pangan perlu keterpaduan lintas sektor dan peran serta daerah antara lain dengan melakukan koordinasi yang baik dalam menetapkan sasaran peningkatan produksi pangan. Peningkatan tersebut terutama bagi sektor non beras dalam mendekati tingkat swasembada pangan dengan mengupayakan peningkatan pangan terpadu antar sektor. Tingginya alih fungsi lahan dan

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nadhia Amelia Shibly, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Pada Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB.

berkurangnya lahan untuk menanam komoditi pangan pokok mengharuskan pemerintah untuk menyusun strategi dalam penyediaan pangan masyarakat sehingga pangan sehat, bergizi, seimbang tetap dapat dipenuhi yang memerlukan solusi untuk menurunkan angka tingkat konsumsi beras dengan komoditi lain tanpa mengurangi nilai gizi dari komoditi tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan adalah pengembangan diversifikasi pangan lokal.

“Menurut Ibu Nadhia Amelia Shibly, Jambi memiliki kekayaan sumber daya alam penghasil karbohidrat yang tinggi seperti kentang dan ubi kedua komoditi ini merupakan sumber daya pangan masyarakat Jambi yang dapat digunakan sebagai pengganti konsumsi beras. Dengan adanya gerakan ini diharapkan mencapai sasaran dalam menurunkan ketergantungan terhadap konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat lainnya. Beberapa olahan pangan lokal non beras telah dilakukan masyarakat yang diharapkan melalui gerakan tersebut dapat membantu UMKM pangan lokal untuk mengembangkan usaha terutama pangan lokal non beras sehingga ketersediaan beras bisa terus terjaga.”³²

Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang terwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang.³³ Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk menjaga ketersediaan pangan dan mencegah terjadinya kerawanan pangan, dengan adanya gerakan Diversifikasi Pangan Lokal dalam penyediaan pangan sehat, bergizi dan seimbang bagi masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah

³² Hasil wawancara dengan Ibu Nadhia Amelia Shibly, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Pada Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB.

³³ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media), hlm 38.

Provinsi Jambi untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. Gerakan tersebut merupakan langkah tepat untuk mengatasi tingkat ketergantungan konsumsi beras. Diharapkan mencapai sasaran dalam menurunkan ketergantungan terhadap konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat lainnya. Tingkat konsumsi beras masyarakat Provinsi Jambi 92.1 Kg perkapita pertahun jika dikalikan penduduk 3,6 juta lebih berarti kebutuhan 397.080 ton, jika kalau diasumsi perhari 300 gram maka 1103 ton perhari atau 33.090 ton sebulan. Dengan adanya gerakan ini jika lakukan satu kali tidak makan nasi dalam satu bulan akan menghemat konsumsi beras sebesar 13.236 ton.

3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan perlu adanya komunikasi antar badan pelaksana yang menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antar pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran.³⁴ Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka peningkatan dalam produksi padi, pendistribusian, memasarkan dan mengolah hasil panen, pemanfaatan lumbung pangan

³⁴ *Ibid*, hlm 31.

yang ada perlu di maksimalkan untuk menghadapi panen raya, agar hasil panen tersebut dapat disimpan dengan maksimal dan terjaga dengan baik.

“Kita di Jambi ini ada 59 Lumbung Pangan yang sebageian besar Alhamdulillah masih aktif untuk meningkatkan ketahanan pangan di desa. Jadi lumbung pangan ini berperan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan dimana ketika saat panen melimpah dengan harga yang murah mereka simpan di lumbung pangan, ketika nanti terjadi kerawanan pangan itu bisa dimanfaatkan, Padi yang ada dilumbung pangan bisa diolah dijadikan beras dan dijual. Lumbung pangan yang tidak aktif bisa didorong agar aktif kembali dan terkait dengan dana pembinaan dan itu telah kita sampaikan ke pusat dan Alhamdulillah responnya positif. Karena mengandalkan dari APBD tidak mungkin makanya kita dorong tadi melalui dana APBN sehingga lumbung pangan kita yang tidak aktif akan bisa diaktifkan kembali, karena insentif ini kita perlu modal untuk pembelian gabah.”³⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat disini bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi juga aktif untuk memaksimalkan lumbung pangan yang ada di Provinsi Jambi yang berperan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan dimana saat panen melimpah dengan harga yang murah dapat disimpan dan ketika terjadi kerawanan pangan, padi yang ada dilumbung bisa memanfaatkan untuk diolah dijadikan beras dan dijual.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi juga melakukan pembinaan untuk pengaktifan kembali lumbung yang ada. Untuk pengaktifan tersebut terkait masalah biaya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tidak bisa mengandalkan APBD, maka dari itu hal tersebut

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Masra Padila, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Pada Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB.

disampaikan langsung kepada pusat agar bisa didorong melalui APBN. Sehingga dalam hal ini partisipasi Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan guna menjaga keberlangsungan setiap lambung yang ada, salah satunya dengan pengucuran dana dari anggaran dana APBN yang mana nantinya hal tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan ketersediaan pangan di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Pada saat ini kualitas sumberdaya manusia yang bekerja pada sektor pertanian masih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dilihat dari tingkat pendidikan mereka sangat rendah dan jarang sekali yang memiliki pengetahuan dan ahli tentang ilmu pertanian yang mencukupi, dan mereka terjun disektor pertanian pun karena tuntunan dan pengalaman yang didapatkan dari orangtua mereka yang sudah turun temurun. Oleh karena itu, kapasitas dan kemampuan petani harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok dalam penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan. Pendekatan kelompok juga dimaksudkan untuk mendorong penumbuhan kelembagaan petani (kelompoktani, gabungan kelompoktani).

Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian, dengan melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya. Dalam suatu masyarakat terdapat berbagai potensi kelembagaan, karena pada dasarnya selalu terjadi interaksi antar individu atau antar kelompok masyarakat yang terpola. Potensi kelembagaan ini dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pembentukan dan pembinaan kelembagaan tani. Rasa sosial untuk saling tolong-menolong perlu ditumbuhkan suburkan agar modal sosial ini tidak terkikis kemajuan masyarakat.

“Pembinaan ini bermaksud untuk membantu para petani agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses teknologi, permodalan, pasar dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan harapan dengan produktivitas meningkat maka ketersediaan pangan pun terpenuhi.”³⁶

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Masra Padila, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Pada Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB.

Dari Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembinaan tersebut dapat membantu para petani agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses teknologi, permodalan, pasar dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya dan diharapkan dapat menunjang keberhasilannya dalam meningkatkan produksi hasil pertanian maka ketersediaan pangan dapat terpenuhi.

5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Ketahanan pangan menjadi suatu prioritas dalam tercapainya suatu kesejahteraan, dalam mewujudkan ketahanan pangan terjaminnya ketersediaan pangan menjadi fokus utama, untuk itu perlu adanya suatu pengawasan. Pengawasan sangat diperlukan untuk mewujudkan praktek kinerja yang sehat, pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan dapat menciptakan suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan

kinerja sudah tercapai. Sehingga dalam konsep ketahanan pangan pengawasan menjadi hal vital yang mana dapat mempengaruhi ketersediaannya suatu pangan pada wilayah tertentu. Di Provinsi Jambi, pengawasan terhadap ketahanan pangan bukan hanya dilakukan oleh satu pihak saja karena pangan cakupan yang luas melibatkan beberapa pihak yang saling berkoordinasi.

“Dalam melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang ada, kita biasanya saling berkoordinasi dengan beberapa pihak misalnya dengan Dewan Ketahanan Pangan dan juga dengan Satgas Pangan yang dibahas dalam rapat koordinasi untuk selalu memperhatikan harga komoditi dengan melakukan pengawasan yang rutin.”³⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pangan guna menciptakan distribusi dan konsumsi ketahanan pangan yang berkesinambungan serta juga harga yang memadai, untuk mencapai hal yang dimaksud tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan harus melibatkan lintas sektor yang bersinergi dan bekerja sama saling berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dewan Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan harus berperan aktif agar terwujudnya ketahanan pangan yang tangguh di Provinsi Jambi.

Melalui penciptaan iklim pengawasan yang kondusif bagi berfungsinya sub sistem ketersediaan, distribusi, dan keamanan pangan secara sinergis, serta mampu meningkatkan pemberdayaan dan

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Masra Padila, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Pada Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 10.30 WIB.

kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkesinambungan karena ada beberapa komoditi pangan yang sangat sensitif terhadap inflasi di daerah, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berlangsung secara optimal dan dapat menjaga kesetabilan harga suatu barang pangan.

“Menurut Bapak M. Daud untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan harga pangan, biasanya kita melakukan operasi pasar, bazar/pasar murah di daerah-daerah, sebagai upaya menekan harga karena ada beberapa komoditi pangan yang sangat sensitif salah satunya beras, itulah perlunya adanya pengawasan dari pemerintah untuk menstabilkan harga agar berada pada level terjangkau oleh masyarakat.”³⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, pengawasan terhadap harga komoditi dilapangan untuk menstabilkan harga pada level terjangkau, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bersama pihak terkait lainnya melakukan operasi pasar, bazar/pasar murah guna mengantisipasi lonjakan harga agar berada pada level yang terjangkau. Tingginya harga beras disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi beras sehingga merugikan petani. Hal penting yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dalam pengawasannya untuk memastikan ketersediaan beras, pihak terkait harus memastikan keseragaman data yang valid antar instansi terhadap produksi beras dan konsumsi beras agar tidak ada kesimpangsiuran data.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M. Daud, Kepala Seksi Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Pada Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 10.00 WIB.

Kemudian, untuk menjamin ketersediaan beras baik dari sisi produksi dan distribusi di setiap daerah sehingga tidak adanya kenaikan harga beras dipasaran yang berdampak luas, serta jaminan terhadap hasil panen para petani apabila pemerintah daerah melakukan pendistribusian beras yang berlebihan ke setiap daerah-daerah yang mengalami defisit jumlah ketersediaan berasnya, maka dalam hal ini fungsi pengawasan sangat diperlukan.

6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Dinas Ketahanan Pangan dalam menjaga stabilitas ketersediaan beras di Provinsi Jambi

Setiap penyelenggara pelayanan publik pasti terdapat beberapa faktor penghambat yang biasanya mempengaruhi terciptanya kualitas pelayanan yang baik. Faktor hambatan sangat berpengaruh pada upaya-upaya peningkatan ketersediaan beras di Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Jambi dijumpai masalah-masalah yang mendasar dan harus segera ditangani.

Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif, dengan demikian permintaan pangan yang akan meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena globalisasi, serta ragam

aktivitas masyarakat, di sisi lain ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, konsumsi pangan dan beberapa faktor lainnya.

1. Faktor teknis:

- a. Berkurangnya lahan pertanian karena alih lahan pertanian ke non pertanian.
- b. Produktifitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat.
- c. Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien.
- d. Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun.
- e. Tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca panen.
- f. Kegagalan produksi karena faktor iklim yang berdampak pada musim kering dan banjir.

2. Faktor sosial-ekonomi:

- a. Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah.
- b. Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi.

- c. Tataniaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani.
- d. Terbatasnya devisa untuk impor pangan.

Dari berbagai faktor diatas, adapun faktor lainnya dalam mewujudkan ketersediaan pangan khususnya beras, Ibu Masra Padila dalam penuturannya menyampaikan :

“Khusus untuk beras yang saat ini peranannya cukup penting karena aktivitas produksi hingga konsumsinya melibatkan hampir seluruh masyarakat, Kita sangat memperhatikan kestabilan produksi maupun harganya. Kondisi saat ini mengikuti asas mekanisme pasar bebas yang membuat kebijakan harga dasar menjadi sulit dipertahankan karena pemerintah tidak dapat lagi membiayai pembelian gabah dan operasi pasar dalam jumlah besar, dan Bulog tidak lagi memegang hak monopoli. Selain itu terbatasnya kelembagaan produksi petani karena terbatasnya dukungan teknologi tepat guna, akses kepada sarana produksi, serta kemampuan pemasarannya adalah tantangan bagi institusi pelayanan yang bertugas memberikan kemudahan bagi petani dalam menerapkan iptek.”³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mewujudkan ketersediaan pangan khususnya beras menghadapi berbagai faktor seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Berkurangnya lahan tanam tersebut tentu memberikan dampak langsung terhadap penurunan produksi, sementara itu naiknya biaya input produksi pertanian seiring dengan inflasi memberikan dampak pada penurunan produksi karena petani petani tidak optimal dalam aktivitas produksinya akibat mahalnya harga input produksi.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Daud, Kepala Seksi Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Pada Tanggal 11 Januari 2020, Pukul 10.00 WIB.

Iklim juga menjadi faktor utama dalam sektor pertanian. Perubahan iklim yang tercermin pada perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu udara, dan naiknya permukaan air laut akan mempengaruhi sistem produksi pertanian tanaman pangan. Perubahan pola curah hujan misalnya, telah meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir dan juga kekeringan, sementara naiknya muka air laut mengakibatkan lahan pertanian di pesisir semakin menciut.

Akibat dari iklim ekstrim pada pertanian tanaman pangan antara lain: kerusakan sumberdaya lahan, penurunan luas tanam, penurunan indeks pertanaman (IP), peningkatan intensitas serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), penurunan produktivitas, dan puso atau gagal panen. Tanpa adanya antisipasi dan intervensi maka target swasembada pangan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah di beberapa daerah akan sulit dicapai secara berkelanjutan. Namun jika antisipasi dan intervensi dilakukan secara tepat, maka perubahan iklim menjadi peluang bagi pengembangan sektor pertanian.

Selain itu, terbatasnya kemampuan kelembagaan produksi petani karena terbatasnya dukungan teknologi tepat guna, akses kepada sarana produksi, serta kemampuan pemasarannya merupakan tantangan bagi institusi pelayanan yang bertugas memberikan kemudahan bagi petani dalam menerapkan iptek, memperoleh sarana produksi secara tepat, dan membina kemampuan manajemen agribisnis serta pemasaran, untuk

meningkatkan kinerjanya memfasilitasi pengembangan usaha dan pendapatan petani secara lebih berhasil guna.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan mengenai pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam sistem pemerintahan daerah guna mewujudkan stabilitas ketersediaan pangan Di Provinsi Jambi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mewujudkan ketersediaan pangan khususnya beras melibatkan berbagai macam pihak terkait lainnya mengingat cakupan pangan yang luas, maka dari itu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bersama pihak yang terlibat terkait permasalahan pangan saling berkoordinasi mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta guna terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat Provinsi Jambi khususnya beras.
2. Faktor hambatan yang dialami Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mewujudkan ketersediaan pangan khususnya beras, faktor teknis seperti: alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien, Infrastruktur pertanian yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun, kegagalan produksi karena faktor iklim yang berdampak pada musim kering dan banjir. Faktor sosial-ekonomi: Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya

terjamin oleh pemerintah, sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi, tataniaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani, terbatasnya devisa untuk impor pangan.

4.2. Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tersebut sesuai apa yang peneliti jumpai di lapangan, maka peneliti memberikan saran dan masukan yang diharapkan dapat menjadi masukan kearah yang lebih baik.

1. Untuk menjaga ketersediaan beras diberbagai daerah, hendaknya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi lebih lebih memaksimalkan lagi program diversifikasi pangan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi. Selain itu juga sosialisai program diversifikasi juga harus ditingkatkan lagi, karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program tersebut.
2. Perlunya meningkatkan pengawasan keluar masuknya bahan pangan ke Provinsi Jambi, sehingga dapat diketahui berapa besar bahan pangan yang keluar dan yang masuk agar situasi ketahanan pangan dari aspek ketersediaan dapat diantisipasi secara dini.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Bustanu. *Diagnosis ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Dirmansyah, Tedy dkk.. *Ketahanan Pangan: Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat daerah Rawan Pangan di Jawa*. Yogyakarta: Plantaxia. 2016.
- Hanafie, Rita . *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: C.V Andi OFFSET. 2010.
- Herdiawan, Didit. *Ketahanan Pangan & Radikalisme*. Jakarta: Republika. 2011.
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media. 2016
- Setiyono, Budi *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta : Caps. Cetatan 1. 2014.
- Siagian, P. Sondang *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strsteginya*, Edisi Kedua. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2001.
- Sufianto, Danang. *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2016
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhardi, dkk. *Hutan Dan Kebun Sebagai Sumber Pangan Nasional*. Yogyakarta: Kansius. 2002.
- Sunarminto, Bambang Hendro. *Pertanian terpadu Untuk Mendukung kedaulatan Pangan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2014.
- Syafiie, Inu Kencana Syafiie. *Sisitem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2011.
- Syafiie, Inu Kencana Syafiie. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2013.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*.Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service). 2014.

Jurnal

Heri Suharyanto. *Ketahanan Pangan*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 4 No.2. November 2011.

Janice Astrella Astrella. *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 3. No. 3. 2015.

Karen Winsdel Dinly Pieris. Ketahanan dan Krisis Pangan dalam Perspektif Malthus. Depedensi dan Gender (*Women in Development*), *Jurnal Hubungan Internasional*. No.1. Januari - Juni 2015.

Yunastiti Purwaningsih. *Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 9. No. 1. Juni 2008.

Skripsi

Supriyanto, Teguh. *Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Desa Mandiri Pangan Di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2014.

Farantika, Iis Hermaeny. *Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Kecamatan Karangdowo Klaten*. Skripsi. Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Lembar Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 53.

Online

Pemerintah Provinsi Jambi Lakukan Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal NonBeras, 19 (Agustus 2020), <https://halojambi.id/index.php/advertorial/53-pemprov/5616-pemerintah-provinsi-jambi-lakukan-gerakan-diversifikasi-pangan-lokal-non-beras>. Diakses pada 24 November 2020. Pukul 20.23.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara bersama Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi



Gambar 2. Wawancara bersama Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi



Gambar 3. Wawancara bersama Kepala Seksi Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

2. Transkrip Pedoman Wawancara Penelitian

1. Apakah mewujudkan ketahanan pangan merupakan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi saja?
2. Bagaimana koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan stabilitas ketersediaan pangan?
3. Apakah Dinas Ketahanan Pangan berperan aktif dalam mewujudkan stabilitas ketersediaan pangan?
4. Bagaimana peranan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mewujudkan stabilitas ketersediaan pangan?
5. Apa saja strategi khusus Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan khususnya beras?
6. Bagaimana bentuk pengawasan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi?
7. Apa langkah yang akan dilakukan jika terjadi situasi kekurangan stok beras?
8. Apakah ada sosialisasi mengenai Diversifikasi Pangan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada satu jenis makanan pokok?
9. Bagaimana perkembangan produksi pangan lokal saat ini?
10. Apa saja yang menjadi hambatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mewujudkan stabilitas ketersediaan pangan?

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Robby Mardino J
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat Tanggal Lahir: Jambi, 15 Maret 1996
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi, Berat Badan : 167 Cm, 50 Kg
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jl. Dr. Sumbiono No.
07 RT 16, Kelurahan
Jelutung, Kecamatan
Jelutung, Kota Jambi
9. No. Handphone : 082299001161
10. Email : robbymardino@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Pertiwi III Kota Jambi III (2001)
2. SD : SDN 58 Kota Jambi (2002-2008)
3. SMP : SMPN 14 Kota Jambi (2008-2011)
4. SMA : SMAN 6 Kota Jambi (2011-2014)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Jambi Fakultas Hukum
Prodi Ilmu Pemerintahan (2014-2021)